

Revenue Distribution and REDD+ in Indonesia

REDD Workshop
CIFOR Campus, 19 March 2010
Penyelenggara: PEACE, RECOFTC, WRI dan CI

Stibniati Atmadja, CIFOR
s.atmadja@cgiar.org



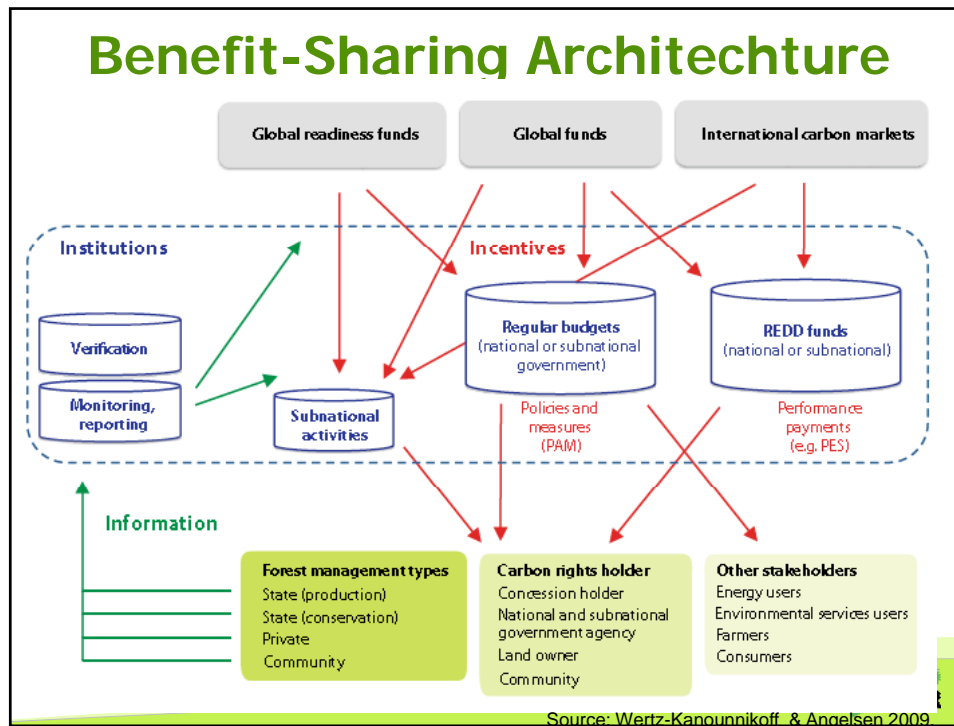
Outline

- Mekanisme benefit-sharing global
- Isu revenue-sharing subnasional
- Kesimpulan

Revenue = pendapatan dari penjualan kredit
REDD+

Benefit = termasuk non-moneter (e.g. capacity
building)





Sumber Dana

- Global readiness fund
 - UN REDD, WB- FCPF
- Global funds
 - Donor
 - Bilateral & Multilateral
- Pasar karbon internasional
 - Sekarang: AS, pasar sukarela lainnya
 - Nanti: pasar karbon wajib (misal: European Trading System, AS)



Sistem Pendanaan

Belum ada sistem pendanaan REDD secara nasional

Tipe sistem yang memungkinkan:

- Sistem Anggaran Nasional (APBN/APBD)
- Anggaran khusus (Mis. Climate Change Trust Fund) – terkait dengan APBN/APBD

Pendanaan proyek REDD kebanyakan masih secara langsung (dana → proyek)



Revenue Sharing at the Subnational level



Apa yang sedang dibagi?

Dana readiness + Donor

- Demonstration activity
- Capacity building
- Memulai proyek pilot

Belum ada dana ke masyarakat karena struktur dan uang belum siap



Uang penjualan karbon?

- Banyak proyek REDD di Indonesia
- Paling awal 2008. Kebanyakan 2009
- Potensi dana 'luar biasa'
- KALAU REDD+ bisa diperdagangkan di pasaran wajib
- Membutuhkan 3-5 tahun untuk proyek mulai siap 'memproduksi' kredit



Mengapa begitu lama?

- Perancangan proyek
- Mencari pendanaan
- Ijin-ijin (tenure, ijin proyek REDD, sosialisasi masyarakat dan pemda)
- Sertifikasi
- Implementasi kegiatan proyek + menunggu efek
- Verifikasi +Pemasaran

Yang sudah menjanjikan uang patut dicurigai



Ketidakpastian

- Skema REDD+ Internasional
- Kredit REDD+ bisa diperdagangkan dengan kredit berasal dari kegiatan lain?
 - YA: Permintaan kredit karbon?
 - TIDAK: Permintaan kredit REDD+?
- Kerangka hukum REDD+ nasional
 - Sistem pengucuran dana
 - Siapa yang mendapat bagian?



Kalau ada uang?

Pengembang proyek :

- Ke tingkat desa (mis. RESPEK), bukan seperti BLT
- Semoga tidak lewat APBD
- Kapasitas pengelolaan dana desa harus dibina

Masyarakat:

- Dana harus menyentuh masyarakat (Mis. BLT)
- Tapi harus menghindari kecemburuan sosial

Pemda

- Harus lewat APBD



Permenhut 36/2009

- Nilai Jual Jasa Lingkungan (NJ2L)
- Dibagi ke Pemerintah, Pengembang, Masy.
- Masyarakat minimal 20%
- 'Pemerintah' = PNBP Kehutanan



Permenhut 36/2009 Lampiran III

No.	Pemegang Izin / Pengembang	Distribusi		
		Pemerintah	Masyarakat	Pengembang
1.	IUPHHK-HA	20%	20%	60%
2.	IUPHHK-HT	20%	20%	60%
3.	IUPHHK-RE	20%	20%	60%
4.	IUPHHK-HTR	20%	50%	30%
5.	Hutan Rakyat	10%	70%	20%
6.	Hutan Kemasyarakatan	20%	50%	30%
7.	Hutan Adat	10%	70%	20%
8.	Hutan Desa	20%	50%	30%
9.	KPH	30%	20%	50%
10.	KHDTK	50%	20%	30%
11.	Hutan Lindung	50%	20%	30%

NP2JL untuk masyarakat

- Dalam bentuk Trust Fund
- Dikelola bersama: Pengembang, Pemda, di fasilitasi Penyuluh kehutanan
- Untuk kegiatan pengamanan area hutan proyek (permanence +menghindari leakage)



Apa kita siap mengelola dana?

- Prestasi pengelolaan dana reboisasi cukup mengecewakan (Barr et al. 2010): Belum siap
- Dilimpahkan ke Depkeu? Bappenas?
- Di tingkat masyarakat belum siap
- Payung hukum belum ada
- Belum ada kejelasan hak atas dana REDD+
- Ada hak ada tanggungjawab – belum dibicarakan



Kesimpulan

- Jangan berbicara uang. Datangnya masih lama
- Bicara tata kelola dana, kejelasan pembagian hak + tanggungjawab
- Permenhut 36 berorientasi ke pengamanan hutan, bukan prestasi dan kompensasi
- Sistem pembagian dana harus disepakati antara masyarakat, pengembang dan Pemda



Terima Kasih

Stibniati Atmadja
Research Fellow, CIFOR

s.atmadja@cgiar.org



Daftar Pustaka

- Wertz-Kanounnikoff, S.; Angelsen, A. 2009. Global and national REDD+ architecture: Linking institutions and actions. In Angelsen, A.; Brockhaus, M.; Kanninen, M.; Sills, E.; Sunderlin, W.D.; Wertz-Kanounnikoff, S.; (eds.). *Realising REDD+: National strategy and policy options*. CIFOR: Bogor, 361 p.
- Barr, C.; Dermawan, A.; Purnomo, H.; Komarudin, H. 2010. Financial governance and Indonesia's Reforestation Fund during the Soeharto and post-Soeharto periods, 1989–2009: a political economic analysis of lessons for REDD+. CIFORL Bogor, 99 p.

